



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2025



*STASIUN PSDKP BELAWAN*

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

# Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan III Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 14 Oktober 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Belawan



**Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H**

NIP. 19830730 200801 1 003

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Triwulan III tahun 2025.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai NKO 102,28. Selama Triwulan III Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 7 indikator kinerja, dimana 14 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung pada semester 1 ataupun tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 7 indikator kinerja:

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
3. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 75 dan capaian sebesar 81;
4. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 75 dan capaian sebesar 81;
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) target 100 dan capaian 100;
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 95% dan capaian sebesar 100%;
7. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 88,5 dan capaian 87,67

Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 58,85% atau sebesar Rp **16.867.421.635,-** (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dari alokasi anggaran Rp **28.661.393.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Melalui Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada triwulan berikutnya.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	5
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar .....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2025-2029.....	8
B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 – 2029 .....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	11
D. Pengukuran Capaian Kinerja .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025 .....	15
BAB IV PENUTUP .....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran dan Rekomendasi.....	43

## Daftar Tabel

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi.....	6
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja .....	7
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 .....	12
Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2025 .....	16
Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2025 .....	17
Tabel 6. Tahapan pemeriksaan IKU 4 .....	19
Tabel 7. Capaian IKU 7.....	19
Tabel 8. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan III.....	21
Tabel 9. Rekap Pengawasan penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya .....	22
Tabel 10. Pemeriksaan IKU 5.....	25
Tabel 11. Capaian IKU 5.....	25
Tabel 12. Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan .....	27
Tabel 13. Rekapitulasi Penerbitan SLO.....	27
Tabel 14. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Kapal Perikanan.....	28
Tabel 15. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan .....	29
Tabel 16. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Jenis Ikan Yang Dilindungi.....	29
Tabel 17. Capaian IKU 9.....	30
Tabel 18. Rekap pengenaan sanksi administratif.....	31
Tabel 19. Kriteria Indeks .....	33
Tabel 20. Capaian IKU 9.....	33
Tabel 21. Capaian IK 16 .....	35
Tabel 22. Capaian IK 17 .....	36
Tabel 23. Capaian IK 18 .....	37
Tabel 24. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2025 .....	43

# Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan .....	5
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan .....	6
Gambar 3. Sistematisa Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan .....	7
Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan .....	15

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidangkalautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan- kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud :**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

### **2. Tujuan :**

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

## **C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

### **3. Bidang Perikanan Tangkap**

- a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan transshipment di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

#### **4. Bidang Perikanan Budidaya**

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memiliki CBIB dan CPIB.
- c. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

#### **5. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan**

- a. Masih terdapatnya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

#### **6. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan**

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR.
- b. Penambangan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

### **D. Data Umum Organisasi**

#### **7. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **8. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

### **a. Kepala Stasiun:**

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

### **b. Kepala Subbagian Umum:**

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

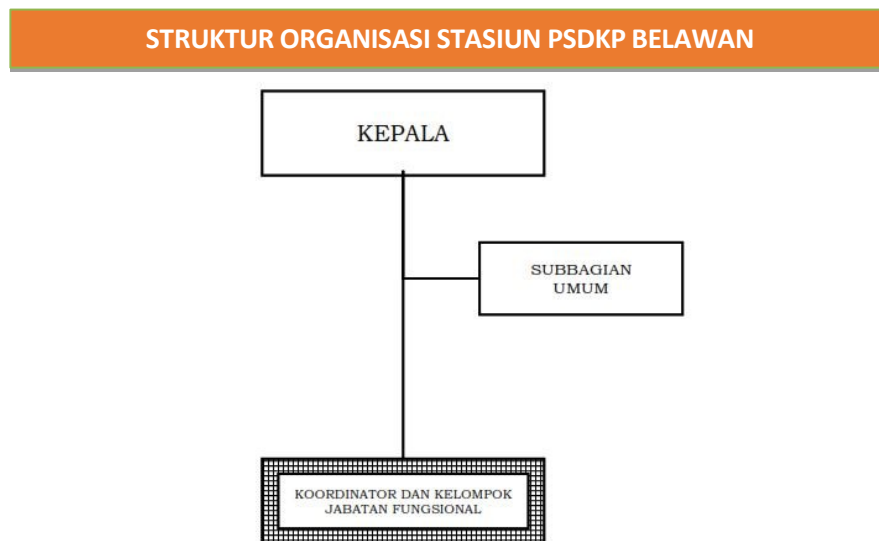
### **c. Kelompok Jabatan Fungsional:**

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

### **f. Satuan Pengawasan SDKP:**

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-

masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 (tiga) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

## 9. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Asahan
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Langsa
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir

## 10. Armada Pengawas dan Speedboat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan speedboat pengawas. Berikut data kapal pengawas dan speedboat pengawas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Stasiun
1	Hiu 01	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
2	Hiu 08	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
3	Hiu 16	32 meter	Stasiun PSDKP Belawan
4	Napoleon 028	12 meter	Stasiun PSDKP Belawan
5	Dolphin 014	8 Meter	Satwas Asahan

Sumber: Bagian Operasi Armada Stasiun PSDKP Belawan

## 11. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2024 sebanyak 128 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 69 orang, 25 orang PPPK, 9 orang PPNPN dan PJLP sebanyak 25 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	PJLP	Jumlah
1	Stasiun PSDKP Belawan	28	7	5	13	53
2	Satwas SDKP Langsa	3			1	4
3	Wilker PSDKP Idi	2			2	4
4	Wilker PSDKP Lhokseumawe	1	1			2
5	Wilker PSDKP Biureun	1				1
6	Wilker PSDKP Sigli		1			1
7	Satwas SDKP Asahan	5	3	3	1	12
8	Wilker PSDKP Batubara				1	1
9	Satwas SDKP Rokan Hilir	3		1	1	5
10	Wilker PSDKP Panipahan				1	1
11	Wilker PSDKP Dumai	1			1	2
12	Wilker PSDKP Kepulauan Meranti	2				2
13	Wilker PSDKP Tembilahan	2				2
14	Hiu 01	8	3		1	12
15	Hiu 08	6	5		1	12
16	Hiu 16	7	3		2	12
	Luar Belawan		2			2
Jumlah Total		69	25	9	25	<b>128</b>

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Stasiun PSDKP Belawan

## E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3. Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: <sup>(1)</sup>Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025 - 2029; <sup>(2)</sup>Manual Indikator Kinerja Tahun 2025; <sup>(3)</sup>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025; <sup>(4)</sup>Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025.

### A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025 – 2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025 - 2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

##### Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

## **2. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

## **B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 – 2029**

Rencana Strategis (Renstra) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025 - 2029 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **A. Program Kerja Pengawasan SDKP**

#### **1. Program**

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025 – 2029 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

#### **2. Kegiatan**

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(3)</sup> Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029, ditetapkan yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi implementatif yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
SK. 2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	02	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
		03	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	04	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	05	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
SK. 5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	06	Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	92
		07	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	92
SK. 6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana	08	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT	100

	Pengawasan SDKP yang sesuai Ketetapan		Stasiun PSDKP Belawan (%)	
SK. 7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	81
SK. 8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	94
SK. 9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	81,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	87
		15	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88,5
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	80
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	1
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	70

#### **D. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

#### 1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 105,80% untuk Triwulan III, capaian dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan  
Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 21 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

#### 2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2025	SEPTEMBER	SEPTEMBER	
<b>SK1</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif</b>						<b>0</b>	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		0
<b>SK2</b>	<b>Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif</b>						<b>0</b>	
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0	0	0
3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0	0	0
<b>SK3</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan</b>						<b>100</b>	
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
<b>SK4</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan</b>						<b>100</b>	
5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif</b>						<b>0</b>	
6	Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
7	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
<b>SK6</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>						<b>0</b>	
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0	0
<b>SK7</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>						<b>108</b>	
9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	75	81	108
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	75	81	108
<b>SK8</b>	<b>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>						<b>0</b>	
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	0	0	0
<b>SK9</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>						<b>101,12</b>	
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,5	0	0	0

13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	0	0
14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	0	0	0
15	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	0	0	0
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SKDP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	95	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,5	80	83,18	99,06
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0	0
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0	0	0
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0	0	0

Pada Triwulan III tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 21 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 7 IK dilaksanakan dengan kriteria 7 IK tersebut dengan predikat baik. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang Triwulan III tahun 2025. Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 58,85% atau sebesar Rp **16.867.421.635,-** (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dari alokasi anggaran Rp **28.661.393.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	12,804,051,000	4,861,156,312	37,97%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	124,487,000	60,418,200	48,53%
3	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	390,708,000	90,394,607	23,14%
5	Dukungan Manajemen	15,342,147,000	11,855,452,516	77,27%
<b>Total</b>		<b>28,661,393,000</b>	<b>16,867,421,635</b>	<b>58,85%</b>

## **B. Analisis Pencapaian Kinerja**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 7 indeks kinerja yang dapat dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan**

Sasaran Kegiatan ketiga menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu;

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan. Kondisi ini tidak berbeda dengan penetapan perjanjian kinerja pada tahun 2024. Penjabaran sasaran kegiatan pada 1 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan.

### **IKU 4: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan**

IKU Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$X_{sdk}$  : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

$X_i$  : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

$n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Tahapan pemeriksaan IKU 4

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

**Analisa penyebab keberhasilan** yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan sharing session dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidental yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

**Analisa kegiatan lain yang menunjang** pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Berikut kami sajikan rekapitulasi data pengawasan SDK selama Triwulan III tahun 2025 lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 8. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan III

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2024
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	1
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	2
3	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	7
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	13
5	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dari kegiatan penangkapan ikan yang Merusak	0	1
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan</b>		<b>2</b>	<b>24</b>

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau

dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif.

**a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya.**

Pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 2 perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Terdapat 2 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi. Kegiatan pengawasan penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya TW III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 9 berikut .

Tabel 9. Rekap Pengawasan penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
PT. Anugerah Alam Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengawasan pencemaran ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 di PT. Anugerah Alam Industri yang merupakan unit pengolahan ikan berupa Pembekuan dan Pengeringan ikan dengan jenis ikan demersal dan Chepalopoda seperti ikan Kerapu, Gurita dan Cumi-cumi;</li> <li>- Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen meliputi UKL/UPL, SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan juga survey lapangan terkait instalasi pengelolaan air limbah</li> <li>- PT. Anugerah Alam Industri memiliki dokumen :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a.NIB 9120204200489 dengan KBLI 10213 yang terbit tanggal 8 Februari 2019</li> <li>b.Dokumen SKP Nomor 768/12/SKP/BK/VII/ 2012 dengan jenis produk ikan beku .</li> <li>c.Dokumen SKP Nomor 187/12/SKP/KR/VII/2011 dengan jenis produk Nila Ikan Kering.</li> </ul> </li> <li>- Bahan Baku Ikan dan Hasil laut lainnya didapatkan dari nelayan kecil dengan pengiriman per bulan sebesar 40 ton. Produk hasil pengolahan berupa ikan Beku dipasarkan ke negara Korea</li> <li>- Limbah yang dihasilkan hanya berupa cairan hasil pencucian dari ikan. Pengolahan limbah dilakukan dengan sedimentasi di 5 bak serta 1 Filter kemudian dialirkan ke parit lalu ke Sungai</li> </ul>

	<p>- Kesimpulan: Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bahwa PT. Anugerah Alam Industri telah patuh dalam kegiatan usahanya serta masih memenuhi persyaratan yang ada pada dokumen perizinan UKL/UPL dan SKP pada bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran</p>
<p>PT. Seafood Sumatera Perkasa</p>	<p>-Kegiatan pengawasan pencemaran pada unit pengolahan perikanan dilaksanakan tanggal 8 Juli 2025</p> <p>- PT. SSP merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memiliki dokumen:</p> <p>a. NIB: 8120002962402 terbit tanggal 20 September 2018 dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan KBLI 4626 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan, 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya dan 10213 (Industri Pembekuan Ikan).</p> <p>b. PKKPR nomor: 060822102112271115 terbit tanggal 6 Agustus 2022 oleh BKPM.</p> <p>c. UKL UPL nomor: 660/5993 diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Medan.</p> <p>d.IMB nomor: 0026/0024/1256/2.5/0202/12/2020 tanggal 8 Januari 2021 diterbitkan oleh DPMPPTSP Pemerintah Kota Medan.</p> <p>e. Izin Lingkungan pada tanggal 18 Februari 2014 dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;"</p> <p>- PT. SSP memiliki IPAL mandiri, dengan 6 bak penampungan air limbah. Kapasitas total bak penampungan 974,8 m3 (mulai dari Bak AQ 1-3; Bak Anaerob 1-4; Bak Aerob 1-6; dan Bak biru) untuk dilakukan pengendapan, treatment menggunakan bakteri pengurai secara berurutan dan kemudian diendapkan di dalam 3 tandon besar. Setelah di endapkan, disaring, di treatment, selanjutnya air tersebut digunakan kembali untuk kegiatan sanitasi (recycle) lantai ruang pengolahan dan air bak pencucian kaki karyawan (foot bath)</p> <p>- Air limbah berasal dari air limbah proses produksi pembekuan ikan dan biota air lainnya dan limbah domestik</p> <p>- Limbah B3 di ambil oleh pihak ke tiga yaitu PT. Sumatera Deli Lestari Indah dan PT. Indostar Cargo sesuai dengan perjanjian Kerjasama pengelolaan Limbah B3 dengan nomor 189.02/PK/SSP-SDLI-ISC/2024 dan 001/PKS/SSP-SDLI-ISC/XII/2024</p> <p>- Berdasarkan hasil pengawasan, dokumen rencana pencegahan pencemaran telah sesuai dengan perizinan serta tersedia fasilitas pencegahan pencemaran</p> <p>- Hasil laporan uji kualitas air limbah terakhir pada tanggal 23 Mei 2025 dengan hasil dibawah baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai</p>

	<p>Permen LH RI nomor 05 tahun 2014 Lampiran XIV dan hasil pengelolaan lingkungan hidup setiap semester di laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan</p> <p>- Kesimpulan: Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran yang dilakukan PT. SSP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran/pencemaran</p>
--	---

## 2. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Indeks Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2024. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

### a. IKU 5: Indeks penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

IKU indeks Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Stasiun PSDKP Belawan dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Indeks kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Tabel 10. Pemeriksaan IKU 5

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel capaian indikator kinerja 6.

Tabel 11. Capaian IKU 5

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100	100	100	100	100

**Analisa penyebab keberhasilan** diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;
3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan sharing session dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak stakeholder yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

**Analisa kegiatan yang menunjang** dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Sepanjang Triwulan III tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 pelaku usaha.

Tabel 12. Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan

NO	BULAN	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	PENGOLAHAN	PEMASARAN	JIL	Total
1	Juli	0	2	0	0	0	2
2	Agustus	2	0	0	0	0	2
3	September	2	1	0	0	1	4
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

### a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Pada TW III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Selama kurun waktu Triwulan III Stasiun PSDKP Belawan telah menerbitkan 942 SLO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Penerbitan SLO

No	UPT/Satwas/Wilker PSDKP	CAPAIAN TAHUN 2025					
		PIT			NON PIT		
		TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL	TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL
1	Stasiun PSDKP Belawan	255	7	262			-
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)			-	14		14
3	Kabupaten Bengkalis (P. RUPAT)			-	12		12
4	Kabupaten Kepulauan Meranti			-	1		1
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)			-	83		83
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai			-	6		6
7	Satwas PSDKP Langsa			-	23		23
8	Kabupaten Aceh Timur (IDI)	18		18	213		213
9	Kota Lhokseumawe (PUSONG)			-	65	1	66
10	Kabupaten Bireuen (Peudada)			-	25		25
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)			-	21		21
12	Kabupaten Pidie			-	37		37
13	Kabupaten Pidie Jaya			-			-
14	Satwas PSDKP Asahan	99	6	105	441	-	441
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>372</b>	<b>13</b>	<b>385</b>	<b>941</b>	<b>1</b>	<b>942</b>

Selain penerbitan SLO di atas, pada TW III Tahun 2025 stasiun PSDKP Belawan melaksanakan pengawasan terhadap 4 pelaku usaha. Adapun hasil pengawasan dapat di lihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Kapal Perikanan

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
TJOAN TJAI ALIAS MANAN	Dokumen perizinan lengkap, sesuai peraturan perundang-undangan, dan masih berlaku pada saat kegiatan pengawasan ini dilaksanakan.  Nilai kepatuhan teknis sebesar 82 % (baik sekali).
JONNER SIMANGUNSONG	Dokumen perizinan lengkap sesuai dengan perundang-undangan, dan masih berlaku pada saat kegiatan pengawasan ini dilaksanakan. Nilai Kepatuhan teknis sebesar 80% (baik sekali)
TAN PENG HUI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha telah memenuhi kewajiban perizinan berusaha</li> <li>2. Pelaku usaha telah melakukan pelunasan PNBK pasca produksi</li> <li>3. SDM (Nakhoda dan KKM) Belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.</li> </ol>
FLORENCE ANGELINE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisa kepatuhan teknis: Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali</li> <li>2. Usaha telah dilengkapi dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan</li> <li>3. Kode proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk Kapal KM. SURYA – 6 dengan izin usaha yang berlaku sampai 31 Desember 2024. Kapal Surya 6 telah memperpanjang izin usaha yang berlaku sampai 31 Desember 2025</li> </ol>

### a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pembudidayaan ikan

Pada TW III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku usaha pembudidayaan ikan. Adapun hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pembudidayaan dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
Edi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memiliki perizinan berusaha berupa NIB sebagai identitas dan legalitas dalam menjalankan usaha</li> <li>- TL pembinaan ke Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka perbaikan / fasilitasi pembuatan perizinan berusaha</li> </ul>
Tri Miswanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memiliki perizinan berusaha berupa NIB sebagai identitas dan legalitas dalam menjalankan usaha</li> <li>- TL pembinaan ke Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka perbaikan / fasilitasi pembuatan perizinan berusaha</li> </ul>
H. Iskandar	- Penilaian Pelaku Usaha Teknis KBLI 3251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau) sebesar 63,5 ( Baik )

### a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan jenis ikan yang dilindungi

Pada TW III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan melakukan pemeriksaan terhadap 1 pelaku usaha jenis ikan yang dilindungi. Adapun hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pembudidayaan dapat dilihat pada tabel 16 berikut :

Tabel 16. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Jenis Ikan Yang Dilindungi

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
CV. CAHAYA SEJAHTERA	- Dari hasil pengawasan, pelaku usaha dinilai patuh

### 3. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

- Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
- Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

**a. IKU 9: Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)**

Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. pengenaaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. pengenaaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Indeks Pengenaaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x* : Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang KP
- a* : Jumlah pengenaaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b* : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 81 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 118 dari 118 kasus pengenaaan administrasi yang terdiri dari 81 Kasus SPKP dan 37 Kasus Pelanggaran Perizinan. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 17. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	75	81	81	81	80

Tabel 18. Rekap pengenaan sanksi administratif

**Kolom A. Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP**

NO	UPT	JUMLAH	ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP
			DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	
(1)	(2)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20) = (17+18)/(10-11-12-13-14)
1	Belawan	81	12	69	30	0	16	16	0	7	21,62%
	<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	

**Kolom B. Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP**

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda	
1	BELAWAN	27	2	1						5	100%
	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

**Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:**

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama Triwulan III tahun 2025 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 20,628,000,- atau sekitar 46,84% dari total pagu Rp. 44,037,000,-.

**b. IKU 10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berStasiun; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Formula :

$$X_{TLH} = \sum_{i=1} \frac{(X1+X2+XN)}{n} \times 100\%$$

- $x_{TLH}$  : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisa Pemantauan SDKP;  
 $X1 + X2 + XN$  : Jumlah Pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi (SP1, SP2 dan denda administarsi) dan bukan pelanggaran;  
 $n$  : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan

Tabel 19. Kriteria Indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 81 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 81 dari 81 kasus tindak lanjut hasil pemantauan SPKP. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 20. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	75	81	81	81	80

**Analisis penyebab keberhasilan** disebabkan antara lain:

1. Stasiun PSDKP Belawan menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Stasiun PSDKP Belawan menyurati UPT Stasiun PSDKP lainnya yang merupakan tempat dimana pemilik kapal terindikasi melakukan pelanggaran berdomisili. Surat tersebut dimaksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan bantuan dari UPT PSDKP lainnya sebagai mediator agar kegiatan BAP dapat dilaksanakan;

Indikator kinerja ini memerlukan perhatian ekstra untuk dapat diselesaikan mengingat dugaan pelanggaran yang setiap hari akan bertambah dan kedudukan kapal ketika berlabuh belum tentu pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Keterlibatan UPT lain juga sangat membantu walaupun sebenarnya belum bisa berjalan dengan optimal mengingat tidak tercapainya waktu yang ideal bagi kedua belah pihak melajukan BAP dikarenakan perbedaan waktu dan UPT PSDKP mitra juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Analisa kegiatan yang menunjang** tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindak lanjut kapal yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Mengingat dugaan pelanggaran setiap harinya terus bertambah maka berdasarkan evaluasi internal maka Stasiun PSDKP Belawan secara kontinu terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun menyurati kepada UPT PSDKP lainnya agar membantu sebagai mediator terlaksananya proses BA permintaan keterangan.

## **5. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP**

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 14 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
3. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
4. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Resiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
6. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah dilengkapi dan disampaikan;
7. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
9. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Selama kurun waktu Triwulan III Stasiun PSDKP Belawan melakukan penilaian terhadap 3 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu point 5,6 dan 7.

### **a. IK 16: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)**

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan

yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 pada Triwulan III tahun 2025**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 21. Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100

**Analisa penyebab keberhasilan** kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

**Analisa kegiatan yang menunjang** keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

**b. IK 17: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan.**

Sebagai bentuk pengawasan dari APIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP maka telah dirumuskan IK "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun UPT PSDKP Belawan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan". Selama TW III tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan memiliki rekomendasi hasil sebanyak 22 rekomendasi yang harus ditindak lanjuti, berdasarkan surat SESDITJEN PSDKP Nomor 1653/DJPSDKP.1/TU.140/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Stasiun PSDKP Belawan telah menindaklanjuti 22 rekomendasi tersebut sehingga capaian Stasiun PSDKP Belawan untuk indikator kinerja dimaksud adalah 100%. Perhitungan capaian tahunan merupakan rata-rata capaian setiap triwulan yang dirata-ratakan. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 22. Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	100	100	100	100	100

**Analisa penyebab keberhasilan** yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindak lanjut sudah diselesaikan.

**Analisa kegiatan yang menunjang** adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

**c. IK 18: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.**

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

$x_{ikm}$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

$x_1$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 87,67 dari target 88,5. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 23. Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW III 2025	2025	TW III 2025	s/d TW III 2024	TW III 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88,5	88,5	87,67	87,67	88,41

**Analisa penyebab keberhasilan** pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang

nyaman.

#### **Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

#### **4. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara**

Stasiun PSDKP Belawan telah membandingkan hasil capaian kinerja dengan Satker UPT setara/ sejenis pada TW III tahun 2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 7 IKU. Bila dibandingkan hasil capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan 8 (delapan) UPT satker setara/ sejenis Stasiun PSDKP Belawan , Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut;

- IKU-4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
<b>5</b>	<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

- IKU-5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
<b>5</b>	<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

- IKU-9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	81	108%
2	Stasiun PSDKP Biak	75	81	108%
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	81	108%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	75	81	108%
<b>5</b>	<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>108%</b>
6	Stasiun PSDKP Kupang	75	81	108%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	81	108%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	75	81	108%

- IKU-10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	81	108%
2	Stasiun PSDKP Biak	75	81	108%
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	81	108%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	75	81	108%
<b>5</b>	<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>108%</b>
6	Stasiun PSDKP Kupang	75	81	108%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	81	108%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	75	41	54,67%

- IKU-16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
<b>5</b>	<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

- IKU-17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan Yang Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
<b>5</b>	<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

- IKU-18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	88,5	94,44	106,71%
2	Stasiun PSDKP Biak	88,5	99,27	112,16%
3	Stasiun PSDKP Ambon	88,5	90,81	102,61%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	88,5	95,51	107,92%
<b>5</b>	<b>Stasiun PSDKP Belawan</b>	<b>88,5</b>	<b>87,67</b>	<b>99,06%</b>
6	Stasiun PSDKP Kupang	88,5	90,29	102,02%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	88,5	94,81	107,12%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	88,5	92,55	104,57%

## 5. Efisiensi

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada Stakeholder, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal sampai Triwulan III Tahun 2025. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dalam Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III 2025 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut :

### 1. Pemanfaatan Google Drive

Google drive merupakan layanan penyimpanan online (cloud), memudahkan pengguna untuk penyimpanan file melalui internet. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan masih menggunakan google drive untuk penyimpanan data kinerja. Hal tersebut sebagai perwujudan satu data lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Dengan adanya penyimpanan secara online semakin memudahkan setiap urusan memperbaharui data kapan saja dan dimana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja pada penyimpanan, akses untuk pengelola hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Belawan.

### 2. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

## 6. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 tanggal 02 Desember 2024, mendapat alokasi dana sebesar Rp. **28.661.393.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki realisasi sebesar **16.867.421.635,-** (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 58,85% berdasarkan data OMSPAN.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Selama Triwulan III Tahun 2025, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahun Triwulan III tahun 2025 dengan nilai NKO sebesar 102,28. Selama kurun waktu Triwulan III UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 7 Indikator Kinerja dengan ke -7 IK tersenut berstatus hijau (baik).

### B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2025 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 24. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2025

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap capaian Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengadakan rapat dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan.</li><li>• Memberikan pelayanan prima terhadap pelaku usaha pengguna layanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Triwulan IV</li></ul>